

# OPEN GOVERNMENT WEEK 2021

## KICK-OFF OPEN GOVERNMENT WEEK INDONESIA 2021

OGI NEWS

JULY 15, 2021



Senin 17 Mei 2021, Sekretariat OGI melakukan pembukaan acara atau Kick-Off Open Government Week (OG Week). OG Week merupakan acara wajib yang diselenggarakan secara serentak oleh semua negara anggota Open Government Partnership (OGP) pada tanggal 17-21 Mei 2021. Sebagai negara anggota OGP maka Indonesia juga menyelenggarakan OG Week yang dikemas dalam bentuk webinar. OG Week memiliki tujuan untuk mempertemukan stakeholders terkait, baik pemerintahan maupun non pemerintah untuk berbagi ide, berdiskusi, mencari solusi dan berkomitmen untuk mendorong keterbukaan pemerintah.

On Monday 17 May 2021, the National Secretariat of OGI commenced Kick-Off Open Government Week (OG Week). OG Week is a mandatory event held simultaneously by all member countries of the Open Government Partnership (OGP) during 17-21 May 2021. As an OGP member country, Indonesia organizes a series of webinars during OG Week. OG Week aims to bring together relevant stakeholders, both government and non-government, to share ideas, discuss, find solutions and commit to encouraging open government.

Dalam acara Kick-Off Open Government Week, Sekretariat OGI menghadirkan Bapak Slamet Soedarsono selaku Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas untuk memberikan Keynote Speech. Bapak Slamet Sudarsono menyampaikan perlunya memperkuat ko-kreasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan pihak swasta dengan memanfaatkan platform digital selain itu, partisipasi masyarakat yang inklusif perlu untuk terus dikawal tidak hanya dalam konteks pada masa pandemi saja namun juga dalam konteks bernegara.

Selain menghadirkan Bapak Slamet Sudarsono, Sekretariat OGI juga menghadirkan beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan OGI untuk memberikan sambutan, antara lain adalah Bapak Joe Powell selaku Deputy Chief Executive of the OGP, Ibu Jaleswari Pramordhawardhani selaku Deputy V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden, Bapak Sugeng Bahagijo selaku Direktur Eksekutif INFID, dan Bapak Febrian Alphyanto Ruddyard selaku Dirjen Kerja sama Multilateral Kementerian Luar Negeri. Keempatnya memberikan ucapan selamat dan mengapresiasi penyelenggaraan OG Week yang menjadi wadah pertemuan antar stakeholders untuk berbagi pengetahuan dan best practices. Dalam sambutannya Pak Sugeng Bahagijo memberikan beberapa masukan penting bagi keterbukaan pemerintah di Indonesia kedepannya. Salah satu masukannya adalah perlunya keterbukaan pemerintah dengan membuat dasar hukum yang lebih kuat sehingga hal ini akan menguatkan ko-kreasi semua lini di lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah.

During the Kick-Off Open Government Week event, the National Secretariat of OGI invites Slamet Soedarsono as the Deputy for Politics, Law, Defense, and Security of the Ministry of National Development Planning/Bappenas to give a Keynote Speech. He explains that we need to strengthen co-creation between the government, civil society, and the private sector by utilizing digital platforms. Inclusive community participation needs to be monitored not only in the context of the pandemic but also in the context of the state.

The National Secretariat of OGI also invited several stakeholders to give remarks, including Joe Powell as Deputy Chief Executive of the OGP, Jaleswari Pramordhawardhani as Deputy V for the Study and Management of Political Issues, Legal, Defense, Security and Human Rights Strategic Office of the Presidential Staff, Sugeng Bahagijo as Executive Director of INFID, and Febrian Alphyanto Ruddyard as Director-General of Multilateral Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs. The four of them congratulated and appreciated OG Week which becomes a forum for stakeholders to share knowledge and best practices. In his speech, Mr. Sugeng Bahagijo delivers several important inputs for the open government in Indonesia in the future. One of the inputs is making a stronger legal basis for open government in Indonesia, this will strengthen the co-creation of all lines in government institutions, both central and regional.

Dalam kesempatan ini pula Sekretariat OGI mencoba memberikan gambaran mengenai OGI itu sendiri, prinsip keterbukaan pemerintah, dan rencana aksi nasional OGI 2020-2022 dengan menghadirkan tiga pembicara yang berkompeten berikut:

Pertama, Bapak Nyoto Suwignyo mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memaparkan materi mengenai “Mekanisme Ko-Kreasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah”. Fokus agenda pemerintah Indonesia saat ini adalah pembangunan SDM, infrastruktur, regulasi, penyederhanaan birokrasi dan mendorong investasi untuk penciptaan lapangan kerja, dan transformasi ekonomi. Agenda pemerintah ini tidak mungkin dijalankan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu kolaborasi antar pemerintah dengan pihak swasta atau masyarakat sipil. Agenda ini perlu diterjemahkan dengan sebaik-baiknya oleh pimpinan daerah sehingga bisa bermanfaat bagi daerahnya.

Pak Nyoto juga memaparkan bahwa berdasarkan dokumen The Worldwide Governance Indicators 2019 yang dikeluarkan oleh World Bank menunjukkan ternyata kondisi pengelolaan pemerintahan di Indonesia belum mendapatkan nilai yang memuaskan. Kondisi pengelolaan pemerintahan Indonesia dinilai berdasarkan indikator berikut:

- a. *Voice and Accountability;*
- b. *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism;*
- c. *Government Effectiveness;*
- d. *Regulatory Quality;*
- e. *Rule of Law;*
- f. *Control of Corruption.*

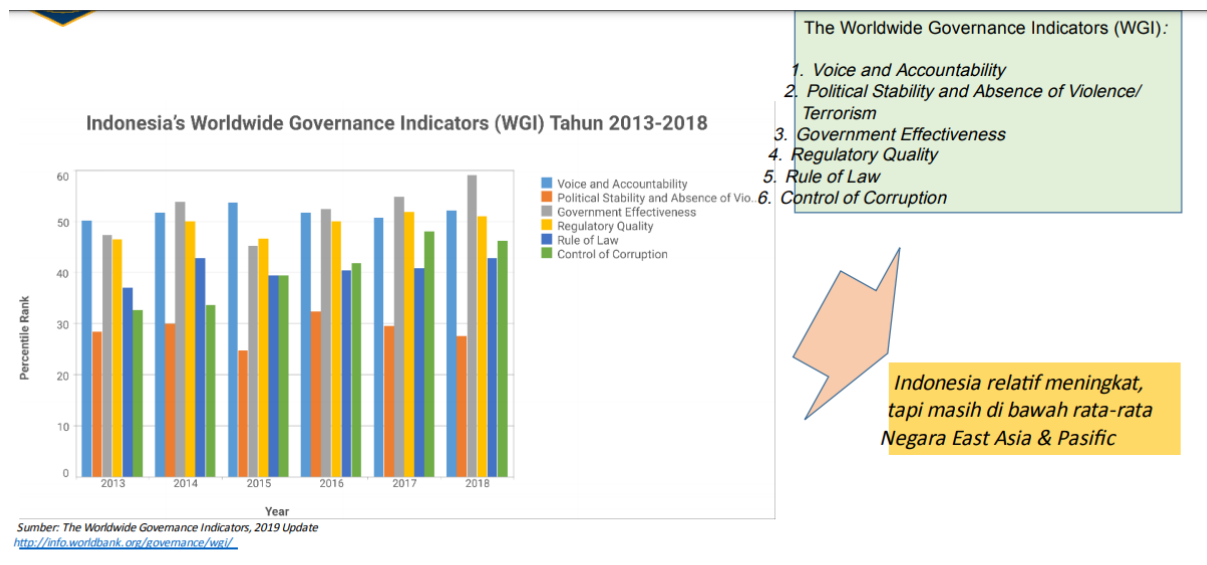
On this occasion, the National Secretariat of OGI also provide an overview of OGI, the principle of open government, and the OGI national action plan 2020-2021 by presenting the following three competent speakers:

First, Nyoto Suwignyo representing the Director-General of Regional Development at the Ministry of Home Affairs presented material on "Co-Creation Mechanisms to Improve the Quality of Regional Development". The current focus of the Indonesian government's plan is the development of human resources, infrastructure, regulations, simplification of the bureaucracy, encouraging investment for job creation, and economic transformation. This government plan cannot be done by the government itself unless there is a collaboration between the government, the private sector, and civil society. This plan needs to be translated by regional leaders so that it can be useful for their region's development.

Nyoto also explained that based on The Worldwide Governance Indicators 2019 document issued by the World Bank, it shows that the state of government management in Indonesia has not received a satisfactory score. The state of Indonesian government management is assessed based on the following indicators::

- a. Voice and Accountability;
- b. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism;
- c. Government Effectiveness
- d. Regulatory Quality;
- e. Rule of Law;
- f. Control of Corruption.

**Picture 1. Indonesia's Worldwide Governance Indicators (WGI) Tahun 2013-2018**



**Source: Nyoto Suwignyo's Presentation, 2021**

Walaupun dari tahun ke tahun nilai Indonesia relatif mengalami kenaikan, tapi jika dibandingkan dengan negara Asia Timur dan Pasifik Indonesia masih di bawah rata-rata negara di dua kawasan tersebut.

Untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik, dibutuhkan tiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Ketiga aktor ini menurut Pak Nyoto harus memiliki kesamaan visi, sebanyak 270 kepala daerah yang sudah terpilih melalui Pilkada saat ini tengah menyusun visi misi, sehingga keterbukaan pemerintah perlu ditangkap dan dimasukkan ke dalam visi kepala daerah. Pemerintah harus mengajak kerjasama pihak swasta dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pembangunan. Pemerintah sudah menyediakan dasar hukum PP No. 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat. Namun PP ini belum berjalan karena tidak ada peraturan menteri atau peraturan pelaksana lebih lanjut. Adanya PP ini sebetulnya bisa dimanfaatkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pilot project yang akan diadakan di 100 kota dan kabupaten di Indonesia.

Although from year to year the value of Indonesia has increased, when compared to East Asia and Pacific countries, Indonesia is still below the average countries in those regions.

According to Pak Nyoto, the government, the private sector, and civil society must have the same vision: There are 270 regional heads who have been elected through the regional head elections and are currently preparing a vision and mission. The government transparency needs to be captured and included in the vision of regional heads. Actually, the government has provided the legal basis, Government Regulation No. 45 of 2017 concerning community participation. However, this regulation has not yet been implemented because there are no ministerial regulations or further implementing regulations. This regulation can be used as a legal basis for the implementation of the pilot project which will be held in 100 cities and regencies in Indonesia.

Ko-kreasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil untuk mengembangkan ide, tujuan, dan kegiatan diharapkan dapat diakumulasikan ke dalam dokumen pembangunan resmi. Dokumen tersebut nantinya akan memberikan batasan terkait kebutuhan mana yang bisa dikerjakan oleh pemerintah dan kebutuhan mana yang bisa dikerjakan oleh swasta atau masyarakat. Dokumen perencanaan ini bisa membuka komunikasi dengan swasta dan manajemen pembangunan pun akan menjadi lebih mudah. Terkait skema manajemen pembangunan, Kementerian Dalam Negeri berkeinginan untuk memasukan pengembangan ekonomi masyarakat dalam dokumen perencanaan dengan mengajak pihak swasta. Pihak swasta dalam hal ini bisa terlibat dengan sebaik-baiknya dan diharapkan bisa mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya secara transparan.

Pemateri selanjutnya adalah Bapak Yanuar Nugroho selaku OGP Envoy Indonesia memaparkan materi mengenai “Melokalkan dan Membumikan Open Government di Indonesia”. Pembangunan kesehatan, pembangunan sosial, dan pemerintahan anti korupsi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih dalam pemilu namun ditentukan juga oleh keterbukaan pemerintah. Terlepas dari OGP yang merupakan komitmen global, Pak Yanuar berpendapat bahwa Indonesia sebelum menjadi pendiri OGP juga sudah berkomitmen dalam keterbukaan pemerintah.

Di era yang sangat kompleks ini diperlukan pendalaman dan perluasan kerjasama antar lembaga sehingga bisa mempercepat pembangunan. Menurut Pak Yanuar bukti bahwa Indonesia sudah berkomitmen dengan keterbukaan pemerintah salah satunya adalah Kabupaten Wonogiri yang desa-desanya sudah terbuka dengan data.

Co-creation between the government, private sector, and civil society in order to develop ideas, goals, and activities is expected to be accumulated into official development documents. The document will provide boundaries regarding be handled by the government and area that can be handled by the private sector. This document also can open communication with the private sector and development management will become easier. The private sector, in this case, can be involved it is expected to realize economic, social, and cultural development in a transparent manner.

The next speaker is Yanuar Nugroho as OGP Envoy Indonesia who presents "Localizing and Internalizing Open Government in Indonesia". Health development, social development, and anti-corruption governance are not only determined by who is elected in the election but also by the open government principles. Yanuar believes that open government is a necessity. In fact, before becoming the founder of OGP, Indonesia had been committed to the open government principles.

In this very complex era, it is necessary to deepen and expand cooperation between institutions so it can accelerate development. Yanuar stated, the evidence that Indonesia is committed to open government principles is the Wonogiri Regency that, has been open to data.

Misalnya, ada data penerima bantuan beras yang terbuka dan tertempel di papan pengumuman di balai desa dan bisa langsung divalidasi oleh masyarakatnya dengan data di pusat.

Mengenai pentingnya keterbukaan data, Pak Yanuar menjelaskan secara konkrit melalui keterbukaan data COVID-19. Pada awalnya data COVID-19 tidak semuanya dibuka kepada publik namun karena kegigihan masyarakat yang mengkritik dan mempertanyakan, maka kini data sudah diperbaiki dan semakin terbuka. Keterbukaan ini sangat membantu kita untuk mengetahui situasi pandemi terkini dalam rangka untuk bertahan hidup.

For example, there is data on recipients of social assistance (Bansos) that is open and put on a bulletin board at the village hall which can be directly validated with national database.

Regarding the importance of data disclosure, Mr. Yanuar explains concretely through the disclosure of COVID-19 data. At first, not all of the COVID-19 data were disclosed to the public, but due to people's criticizes, now the data has been improved and is becoming more open. This openness could help us to know the current pandemic situation to survive.

Gambar 2. Keterbukaan Data terkait COVID-19 di Indonesia



Sumber: Paparan Bapak Yanuar, 2021

Misalnya, data vaksinasi yang sudah dilakukan pemerintah baru mencapai angka 8,9 juta dari sekian ratus juta penduduk Indonesia yang ditargetkan untuk divaksin. Dengan melihat data ini bisa diketahui bahwa pandemi di Indonesia masih akan berlangsung lama karena satu-satunya cara menghentikan pandemi ini adalah dengan vaksinasi. Selain itu, dari data yang terbuka kita juga bisa mengevaluasi dan melakukan pembangunan dengan lebih baik.

One of the example is vaccination data, So far, vaccination that has been done by the government has only reached 8.9 million of hundred million Indonesians targeted for vaccination. By looking at this data, it can be seen that the pandemic in Indonesia will still last for a long because the only way to stop this pandemic is vaccination. Through the open data, we can also evaluate and carry out developments to right direction.

Nilai-nilai keterbukaan pemerintah menurut Pak Yanuar perlu dibumikan dan diberikan konteks dengan mengangkat isu-isu yang saat ini tengah dihadapi masyarakat global dan nasional. Keterbukaan pemerintah tidak hanya terjadi ketika presiden rapat terbuka dengan menteri saja. Lebih dari itu, keterbukaan juga harus dipastikan terjadi sampai ke tingkat lapangan. Artinya, pembuatan kebijakan juga harus melibatkan masyarakat secara terbuka. Keterbukaan dibuat untuk menguatkan relasi, kualitas, dan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Ujung dari keterbukaan pemerintah adalah relasi dan kepercayaan masyarakat. Dengan keterbukaan masyarakat bisa bernalar mengenai patut tidaknya suatu tindakan pemerintah untuk dipercaya. Terakhir, Pak Yanuar menegaskan bahwa hanya orang yang kuat yang berani terbuka.

Pembicara terakhir yaitu Ibu Prahesti Pandanwangi selaku Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas memberikan pemaparan mengenai "Pelaksanaan RAN OGI 2020-2022". Ibu Prahesti menjelaskan bahwa OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik keterbukaan pemerintah yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. OGI Mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabilitas yang inklusif untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan operasional OGI seperti memfasilitasi pencapaian RAN OGI dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengkonsolidasikan gerakan-gerakan keterbukaan lainnya baik dalam skala nasional maupun daerah maka pemerintah melalui Kepmen PPN/Bappenas membentuk Sekretariat Nasional OGI.

The open government values, according to Yanuar, need to be given context by raising the issues that are recently faced by the global and national community. Open government does not only occur when the president has an open meeting with the minister. More than that, civil society is needed to be involved in policy-making. It means that policy-making must also involve the public openly. Openness is made to strengthen relations, quality, and government capacity in providing public services. The goals of open government are public relations and trust. With openness, people can have reasons whether a government action should be trusted. Finally, Yanuar emphasizes that only strong people dare to open up.

The last speaker, Prahesti Pandanwangi as Director of State Apparatus of the Ministry of National Development Planning/Bappenas, delivers a presentation on "Implementation of OGI National Action Plan 2020-2022". Prahesti explained that OGI is an initiative of the Government of Indonesia in implementing open government since 2011. Through OGI, the Government collaborates with Civil Society Organizations (CSOs) to generate ideas, initiatives, and open government practices that can accelerate the achievement of targets and national priorities. OGI promotes open government values namely transparency, participation, innovation, inclusive, and accountability to strengthen government administration and public services. To fulfill OGI's operational needs, such as facilitating the achievement of the OGI NAP and coordinating with stakeholders in consolidating other open government practices both on a national and regional scale, the government through the Decree of the Minister of National Development Planning/Bappenas established the National Secretariat of OGI.

Ibu Prahesti juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat OGP Local yang dapat menjadi medium yang baik bagi pemerintah daerah karena unsur keterbukaan bisa menjadi masukan dalam penyusunan visi kepala daerah yang terpilih. Selama 10 tahun OGI sudah berjalan kini rencana aksi nasional (RAN) OGI telah memasuki RAN yang ke-6. Penyusunannya menghasilkan 18 komitmen melalui 106 rapat pembahasan dan melibatkan 27 organisasi masyarakat sipil, serta 32 kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mana 53% peserta yang terlibat adalah perempuan.

Komitmen RAN OGI 2020-2022 saat ini sebenarnya berkesesuaian dengan SDGs, utamanya adalah SDGs 1 yaitu tanpa kemiskinan, SDGs 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, SDGs 5 tentang kesetaraan gender, SDGs 16 tentang keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan SDGs 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Agar OGI memiliki tujuan dan fokus yang lebih jelas dan terarah maka saat ini tengah dilakukan penyesuaian dan akan memperkuat dasar hukum OGI. Beranjak dari penjelasan mengenai OGI dan RAN OGI Ibu Prahesti kemudian menyinggung mengenai OGI Week yang merupakan sarana bagi kepala daerah atau kementerian untuk mendapatkan pengetahuan baru yang bisa menjadi referensi pembangunan di daerah. Beberapa contoh implementasi RAN OGI yang bisa dijadikan referensi adalah seperti: pengarusutamaan tata kelola pemerintahan di era digital melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! di website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), Portal Data APBN (Kementerian Keuangan), dan Gender Responsive Budgeting di Desa Wonolelo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prahesti also explained that currently there is a OGP Local which can be a good medium for local governments because open government values can be included in the preparation of the vision of the elected regional head. For 10 years the OGI has launched its 6th. Its preparation resulted in 18 commitments through 106 discussion meetings and involved 27 civil society organizations, as well as 32 ministries/institutions/local governments of which 53% of the participants involved were women.

The OGI NAP 2020-2022 commitment is actually in line with the SDGs, mainly SDGs 1 which is zero poverty, SDGs 3 on health and welfare, SDGs 5 on gender equality, SDGs 16 on justice and strong institutions, and SDGs 17 on partnerships. For OGI to have more focused goals, the government will strengthen the legal basis of OGI. Prahesti then mentions that the purpose of OGI Week is a chance for regional heads or ministries to gain new knowledge that can be used as a reference for regional development. Some examples of the implementation of the OGI NAP that can be used as references are: mainstreaming governance in the digital era through the People's Aspiration and Online Complaints Service or LAPOR! on the website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), the APBN Data Portal (Ministry of Finance), and Gender Responsive Budgeting in Wonolelo Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region.



Sebagai penutup, Pak Yanuar memberikan closing remarks dengan mengatakan bahwa pembangunan sejatinya hanya bisa dicapai jika masyarakat sipil dan pemerintah bisa duduk bersama memahami kegelisahan satu sama lain sehingga keterbukaan pemerintah menjadi penting untuk saat ini dan untuk kedepannya. Ibu Prahesti dalam closing remarks-nya mengatakan bahwa acara OG Week ini berisi bermacam info, pengetahuan, dan best practices yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga, pemerintah daerah, maupun OMS, dan patut untuk dipelajari serta dikritisi secara konstruktif.

Finally, Yanuar delivers closing remarks by saying that development can only be achieved if civil society and the government can sit together and understand each other's anxieties. The open government principles are crucial for now and for the future. Prahesti in her closing remarks stated that the OG Week event contains various information, knowledge, and best practices that have been carried out by various institutions, local governments, and CSOs, and worth to be studied and criticized constructively.